

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM PENGGAJIAN PENGELOLA ZAKAT
(Studi di Baznas Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**NUR HASIAN
NPM : 1621030189**

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM PENGGAJIAN PENGELOLA ZAKAT
(Studi di Baznas Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

NUR HASIAN

NPM : 1621030189

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H. M, Hum.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2021M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman. Dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat”**, Istilah dari judul tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, padangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹. Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penggajian di Baznas.
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia maupun diakhirat.²
3. Sistem adalah perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1470

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992), h.17-18

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h,1320

4. Penggajian adalah proses, cara, perbuatan membayar gaji (upah) kepada karyawan nya.⁴
5. Pengelola adalah orang yang mengelola suatu lembaga yang terkait.⁵
6. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beagama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimannya.⁶ Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan bahwa maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem penggajian pengelola zakat dalam Baznas ditinjau dalam segi hukum Islam.

B. Alasan memilih judul

1. Alasan objektif

Perkembangan zaman demikian pesat, maka persoalan Muamalah pun berkembang. Sehingga perlu memahami dengan benar sistem penggajian pengelola zakat lebih spesifikasinya tentang pembayaran karyawan dengan sistem yg sesuai.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan judul ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal kali ini.

⁴ *Ibid* h. 406

⁵ *Ibid*

⁶ Zakat (on-line), tersedia di: <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 27 agustus 2020

C. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal, yang dapat mendatangkan hasil atau keuntungan dalam bentuk uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian maupun keterampilan tertentu.⁷ Dengan mengeluarkan zakat dari hasil yang kita peroleh maka hidup menjadi lebih berkah, dan harta hasil yang didapatkan tentunya menjadi berkah dan bersih sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.⁸

Zakat mengandung dua fungsi ibadah, yaitu ibadah individual terhadap Allah SWT dan juga melakukan ibadah sosial terhadap sesama manusia. Dengan mengeluarkan zakat akan tercipta distribusi kekayaan antara seseorang yang mempunyai harta yang berlebih dan seseorang yang kekurangan harta. Zakat adalah bentuk ibadah yang sudah tidak asing lagi bagi umat muslim, namun kebanyakan dari mereka mengenal (mengetahui) tentang zakat fitrah dan zakat mal.

Seiring kemajuan perkembangan zaman serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan moderen. Maka muncul pula berbagai jenis harta kekayaan baru yang potensial dan produktif, meskipun jenis harta kekayaan yang baru tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah SAW, akan tetapi hal itu bukan berarti menjadi pengecualian bahwa jenis harta kekayaan selain dari yang disebutkan dalam *nash* adalah tidak wajib dizakati.

⁷ Dzulkarnain Sunusi, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 36

⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Zakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.

Salah satu jenis zakat yang menurut tuntutan syariat dapat di manfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian adalah zakat Mal (harta). Walaupun disadari bahwa potensi zakat cukup besar dan selalu berbanding lurus tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat Islam pada umumnya baru mengenal dan menunaikan zakat fitrah, sementara zakat harta masih sangat sedikit yang memahami dan menyadarinya sebagai kewajiban, khususnya bagi mereka (pemilik harta) yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (*nishab* dan *haul*).⁹

Pendidikan ilmu (pengetahuan) sangatlah penting untuk mendukung pemahaman masyarakat, terutama tentang pemahaman agama, karena pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan daya kreativitas dalam mengambil keputusan. Pemahaman agama sangatlah penting untuk mengetahui kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami dan menghayati nilai-nilai ajaran agama yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis serta mempraktikkan nilai-nilai ajaran agama Islam tersebut dalam bersikap dikehidupan sehari-hari.¹⁰

Tidak terkecuali pemahaman terhadap Sistem Penggajian Pengelola Zakat, zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pelaksanaan yang baik zakat merupakan

⁹ Gamsir Bahmid, *Prilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 46

¹⁰ Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Citra Persada, 2002)

sumber dana potensial yang dapat mensejahterakan kehidupan umat.¹¹

Dan Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "*Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S Al Baqarah (2): 43)*"¹²

Dari ayat tersebut sudah dijelaskan, maka bagi mereka (pemilik harta) yang memahami dan menyadari bahwa zakat itu sebagai kewajiban. Kemudian terdapat lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yaitu lembaga pemerintahan nonstruktur yang melakukan pengelola zakat secara nasional, struktur organisasi Baznas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat.

Badan amil zakat nasional Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Baznas tingkat Kabupaten/Kota untuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shodaqoh.

Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. Lembaga

¹¹ Nurrudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 53

¹² Q,S Al-Baqarah 2:43

Baznas menerima atau melayani pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui: Tim penjemput Zis, bank yang ditunjuk atau ke kantor Baznas Kota Bandar Lampung. Seluruh amil zakat (Baznas) agar memiliki kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan tujuan lembaga dan memberikan imbalan dan balas jasa sesuai peran dan kinerja para Amil Zakat Baznas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan lembaga, maka dari itu Lembaga Amil Zakat nasional (Baznas) memberikan gaji 12,5% untuk karyawan dari sebagian zakat dari 8 (delapan) Asnaf, karna karyawan lembaga amil zakat nasional Baznas termasuk kedalam golongan Amil zakat yang sudah tercantum dalam hukum Islam.¹³

Dalam hal ini sistem penggajian yang dilakukan oleh Baznas untuk para karyawan diambil 12,5%, dalam ricianya yaitu kisaran Rp.12,500,00 dalam Rp 100.000,00 rupiah yang di sesuai kan dengan tugas dan kerja melalui musyawarah yang di sepakati oleh SK. dari keseluruhan pendapatan zakat, infaq, shodaqoh dll, serta ditambah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memang di khususnya untuk lembaga-lembaga seperti ini. Akan tetapi seringkali pendapatan dari zakat, infaq, dan shodaqoh ini tidak menentu yang mengakibatkan pembagian gaji setiap bulannya tidak sama, maka dari itu dana

¹³ Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional, nomor 3 Tahun 2018, *penyebarluasan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 24 Tahun 2018*. Diakses <https://baz.madiunkota.go.id> pada tanggal 27 agustus 2020

bantuan dari pemerintah di ambil untuk membayar Gaji karyawan, apabila gaji tersebut belum mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian karyawan Baznas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan ini terfokus pada sistem penggajian pengelola zakat yang dilaksanakan di Baznas Bandar Lampung akan dilihat gambaran sistem penggajian tersebut sesuai dengan hukum Islam.

D. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Pelaksana Sistem Penggajian pengelola zakat di Baznas Bandar Lampung.

E. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksana sistem penggajian pengelola zakat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang sistem penggajian pengelola zakat di Baznas Bandar Lampung?

F. Tinjauan penelitian

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksana sistem penggajian pengelola Zakat
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat di Baznas di Bandar Lampung.

G. Signifikasi/manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis maupun konseptual terkait dengan ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam kegiatan penerapan sistem penggajian pengelola zakat.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang melakukan sistem penggajian pengelola zakat dalam tinjauan hukum Islam agar dapat mengetahui hukumnya sesuai dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Penelitian

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau data yang digunakan data lapangan/responden¹⁴. Melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang di gunakan data lapangan,

¹⁴Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9

penegasan judul menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literature/kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif. Bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisi, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan/menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari sistem penggajian pengelola zakat dalam

¹⁵ *Ibid*, h.10

¹⁶ Moh Pabundutika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006),

tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, biasanya melalui wawancara, dalam hal ini yang dijadikan narasumber untuk data penelitian berjumlah 3 sebagai data dalam penelitian yang berjudul tentang sistem penggajian pengelola zakat di Baznas Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁷ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara: al-Qur'an, hadist, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.¹⁸ Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola zakat dalam sistem penggajian, dalam wawancara narasumber dalam penulisan ini.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁹ Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penegasan sistem penggajian pengelola zakat.

¹⁸ Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesian, 2014), h. 154

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

d. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasannya dan kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

b. Sistematikasi Data

Sistematika data merupakan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

c. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif merupakan cara untuk mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan tentang sistem penggajian pengelola zakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *Thaharah* berarti *kesucian*, barokah berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah Tathhir* yang artinya *mensucikan*. *Syara'* memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Ke dua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Menurut imam Nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna kesuburan,” kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunah, nafkah, kemanfaatan dan kebenaran, Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat.¹

Kata Zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. 82 kali diantaranya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*. Tidak benar kata Zakat terdapat bersama kata sholat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan dalam pengarang *Fiqhus-synnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan shalat hanyalah pada 28 tempat saja.² Dan pengertian zakat

¹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3

² *Ibid.* h.4

lainnya, pilar utama dan pertama dari perekonomian Islam yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mekanisme fiskal zakat yang menjadi syarat dalam perekonomian ini.

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan distribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu: fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnussabil*, amil, *gharimin*, hamba sahaya, muallaf. Dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* ‘keberkahan’, al-nama ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shahalu* ‘keberesan’ dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.³

Pengertian lainnya mengenai Zakat yaitu, Zakat secara *harfiyah* mempunyai makna: pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah zakat artinya kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *Mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al-Qur’an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagai besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabungkan dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), h. 9

115 kali.⁴ Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat adalah termasuk ke dalam rukun Islam yang diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun ke dua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. *Ijma* (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Zakat merupakan ibadah *Maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ke lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.⁶ Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya yaitu:

⁴ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 407

⁵ *Ibid*, h. 408

⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, Tahun 2008, h. 6

a. Al-Qur'an

Surat At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

b. Dalil Sunnah

بَيَّيْنَا الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

Artinya: "Islam dibangun di atas lima hal : kesaksian sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari Muslim).

Telah dimaklumi bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam .

3. Sejarah Zakat Mal dan Nafs

Sejarah zakat Mal, atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi Saw, berhijrah ke Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat di perhatikan Islam, karena urusan tolong menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan di butuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada awalnya, zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat.

Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan kebaikan para pemberi zakat sendiri. Hal tersebut berjalan hingga tahun ke dua Hijriyah. Mereka yang menerima pada masa itu adalah dua golongan saja, yaitu: faqir dan miskin.

Pada tahun ke dua Hijriyah, bersama dengan tahun 623 masehi, barulah syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing. Sebagai ulama berpendapat,

“sesungguhnya zakat difardukan sejak tahun ke dua hijriyah.” Yang menerimanya masih dua golongan saja yakni:

Fuqarah dan *masakin*, sebelum

dibagi kepada tujuh atau delapan bagian. Ketetapan pembagian ini, yakni kepada faqir miskin saja, kita *istinbath*-kan dari firman Allah swt:

Surat Al-Baqarah ayat: 271

ۖ
 إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٧

“Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan membersihkannya kepada orang-orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah[2]:271)

Ayat tersebut diturunkan dalam tahun ke dua hijriyah. Dengan memperhatikan tahun turunnya, kita mendapatkan kesan bahwa zakat, diperintahkan pada tahun ke-2 hijriyah itu dan beberapa tahun berikutnya.

Pembagian kepada ke dua golongan ini saja, berlangsung hingga tahun ke sembilan Hijriyah. Kita berpendapat bahwa pembagian zakat kepada ke dua golongan tadi berlangsung hingga tahun ke-9 Hijriyah. Karena ayat yang menerangkan bahwa golongan yang menerima zakat adalah tujuh atau delapan golongan baru diturunkan pada tahun ke sembilan Hijriyah. Pada tahun ke-9 Hijriyah, Allah menurunkan ayat 60 surat At-Taubah atau Al-Baqarah. Sesudah turun ayat tersebut,

⁷ Q.S Al-Baqarah[1]:271, h. 57

barulah jelas golongan-golongan yang boleh dan berhak mengambil zakat serta menerimanya.

Namun demikian Nabi tidak juga membagi penuh delapan golongan tersebut, dan hanya memberikan kepada golongan-golongan yang dipandang perlu menurut keperluan dari bagian yang delapan itu.⁸ Berdasarkan riwayat dari Bukhari dan Ibnu Sa'ad, ia menegaskan, bahwa zakat boleh diberikan kepada satu *shinf* (golongan) dari delapan golongan tersebut, yang menurut kemaslahatannya, dan menegaskan bahwa ayat 60 tersebut bukan memastikan zakat di bagi delapan, atau sebabnya yang ada ketika membaginya, hanya menerangkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan bagian saja. Orang yang tidak masuk ke dalam golongan yang delapan, tidak menerima zakat.

Sejarah zakat *nafs*, pada suatu hari di tahun ke-2 Hijriyah atau tahun 623 Masehi sebelum Syara' menentukan harta-harta yang dizakatkan (zakat mal) dan kadarnya masing-masing, Nabi SAW mengumumkan di hadapan para sahabat beberapa kewajiban Islam. Diantara butiran tutur kata beliau pada hari itu, ialah "*kewajiban mengeluarkan zakat nafs, (zakatul fitri) yang sangat terkenal dalam masyarakat kita dengan nama fitrah.*"

Nabi mengumumkan hal itu dua hari sebelum hari raya puasa (Idul Fitri), yang pada tahun itu baru dimulai. Pada hari itu Nabi SAW. menerangkan kewajiban dan kefardhuan fitrah sebelum pergi ke tempat sholat hari raya (sebelum shalat hari

⁸ *Ibid*, h. 10

raya).⁹ Apabila Nabi SAW. membagi zakat *nafs* ini kepada fakir miskin saja, seperti halnya membagi zakat harta sebelum diturunkan ayat 60, bahkan sesudahnya Nabi SAW. Sangat mementingkan fakir miskin, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa zakat *nafs* hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Dari apa yang dikerjakan Nabi SAW. tersebut dapat diketahui, bahwa hendaklah kita mementingkan fakir miskin ketika membagi zakat *nafs* dan kita boleh menghabiskan zakat untuk keperluan fakir miskin saja.¹⁰

4. Macam-Macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua:

- a. Pertama, *zakat Mal (harta)*: emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (Buah-buahan dan bijian) dan barang perniagaan.
 - b. Ke dua, *Zakat Nafs*, yaitu zakat jiwa yang disebut juga “*zakatul fitrah*.” zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan.¹¹
- Di negeri ini, Lazim disebut *Fitrah*. Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada ke dua bagian. *Pertama*, Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. *Ke dua*, zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.

⁹ *Ibid*, h. 11

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) h. 8

Adapun *Fitrah*, sebagian ulama memasukkannya dalam golongan harta lahir. Menurut nash Asy-syafi'i, *Fitrah* masuk golongan zakat harta batin. Ahmad mengatakan, “saya amat suka *fitrah* di berikan kepada sulthan (penguasa).

Menurut para ulama apa sebab barang dagangan dipandang harta bathin (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk dipajangkan atau tidak. Barang (benda) tidak menjadi barang dagangan kecuali memenuhi beberapa syarat.¹²

5. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan:

a. Syarat-syarat *Muzakki* (orang yang wajib zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah:

1). Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

¹² *Ibid*, h. 9

2). Islam

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat karena itu, menurut Abu Hanifah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang-orang kafir.

3). Baligh berakal

Mengenai persyaratan baling berakal ini berbeda menurut para ulama. Menurut ulama Mazhab Hanafi, orang yang diwajibkan zakat yaitu orang yang telah balig dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah wajib seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga diwajibkan atas mereka.¹³ Selain Syarat-syarat tersebut, ulama fiqih juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Niat

Zakat termaksud kedalam ibadah *Mahda* yang bertujuan mencapai pahala dan keridhaan Allah yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 250

menyempurnakan pelaksanaan seseorang harus memulainya dengan niat.

2. Bersifat pemilikan

Sesuai dengan pengertian zakat yang dikemukakan para *Fuqaha*, bahwa zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada *mustahik* zakat harus bersifat pemilikan, yaitu artinya zakat yang diberikan harus milik sendiri. Oleh karna itu bila harta tersebut diberikan dalam bentuk pembentukan pembolehan pemanfaatannya saja ataupun bersifat pinjaman maka tidak bisa di sebut dengan zakat secara hukum dan zakatnya tidak sah.¹⁴

b. Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1). Milik Sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik sempurna atau milik penuh, yakni berada dibawah kekuasaan dan di bawah kontrol orang yang berzakat. Oleh karena itu seorang pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ke tangannya atau belum tau hasilnya.

¹⁴ *Ibid*, h.51

2). Berkembang

Maksud dari berkembang yaitu, meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan. Bukan hasil dari penggunaan harta seperti melakukan investasi yang menghasilkan pendapatan. Atas harta ini tidak diwajibkan di zakati kecuali atas hasil-hasilnya. Syarat ini mempunyai asumsi dasar bahwa zakat tidak mengakibatkan *Muzakki* menjadi miskin, namun akan menjadi lebih berkembang kekayaannya.

3). Cukup senisab

Nisab merupakan batasan minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar). Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqih. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tariff zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta di atas nisab saja.

4). Lebih dari kebutuhan biasa

Ukuran kebutuhan biasa merupakan suatu yang sangat relatif sifatnya, setiap orang akan berbeda dalam pemenuhan kebutuhan biasanya, apa lagi dalam kondisi perekonomian saat ini yang menganggap bahwa barang mewah pun sudah menjadi kebutuhan. Kebutuhan biasa

dapat diukur dengan kebutuhan rutin pisik minimal untuk diri *muzakki*, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sehingga mereka dapat hidup sehat.¹⁵

5). Bebas dari Utang

Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab dan berkembang dapat dizakatti apabila sudah terbebas dari utang. Syarat utang yang harus dibayar dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun), walaupun ada yang membolehkan semua jenis utang, namun tetap jenis utang yang berkaitan dengan harta yang diterima atau di milikinya.

6). Berlalu Setahun

Ada dua kelompok benda zakat, yaitu zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan “berlalu satu tahun” hanya diterapkan pada zaman modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang, sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan “berlalu satu tahun” tidak diberlakukan, karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima.¹⁶

6. *Mustahiq Zakat*

Sejarah awal pertumbuhan Islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat (infaq) itu adalah orang kalangan miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT menurunkan ayat 60 surat al-taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang benar-

¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),
h. 91-93

¹⁶ *Ibid*, h. 94

benar berhak menerima zakat. Ayat yang dimaksud adalah:
Surat At-Taubah[9]:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبَاتِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut.

a. Orang Fakir

Para ulama banyak yang tidak sependapat dalam memberi definisi terhadap terminologi fakir. Dari Ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki mendefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia

¹⁷ Q.S At-Taubah [9]:60, h. 264

juga tidak mempunyai suami atau anak atau saudara yang menanggung nafkahnya

b. Orang miskin

Para ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang mempunyai arti satu yaitu orang yang serba berkurangnya atau yang benar-benar membutuhkan.¹⁸ Ada yang mengatakan bahwa dua kata itu memiliki arti yang berbeda, karena kalau keduanya mempunyai arti yang satu niscaya Allah SWT tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah itu jelas berbeda. Ahli fiqh Mazhab Syafi'i dan Hambali misalnya mengatakan makna ke dua istilah itu jelas berbeda. Orang fakir, menurut mereka lebih parah keadaan ekonomi dari orang miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen (25%) dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya. Sedangkan orang yang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen (50%) atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi.¹⁹

Diantaranya alasan yang mengatakan bahwa orang fakir lebih berat keadaan ekonominya dari orang miskin ialah:

¹⁸Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2004) h. 200

¹⁹ *Ibid*, h.201

- 1). Bahwa dalam ayat 60 At-Taubah Allah SWT mendahulukan penyebutan golongan fakir dari golongan miskin dalam biasanya menurut mereka Allah SWT selalu mendahulukan menyebut hal-hal yang lebih penting dari yang lain. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan umatnya mendahulukan apa yang didahulukan Allah SWT.
- 2). Dari segi bahasa kata fakir berarti orang yang sudah patah atau tercabut tulang punggungnya sehingga tidak mampu membalikan badanya. Artinya orang fakir tidak memiliki daya untuk bekerja dan orangnya lumpuh.
- 3). Dalam hadis diterapkan bahwa Nabi SAW meminta perlindungan dari kefakiran dan memohon menjadi orang yang miskin (HR. Tarmuzi).
- 4). Allah SWT berfirman Surat Al-Kahf (79):18

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

“adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut...

Arti tersebut menjelaskan bahwa orang miskin masih memiliki harta dan pekerjaan yaitu sampan yang digunakan untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Sedangkan orang fakir tidak pernah disebut Allah dalam al-Quran sebagai orang yang memiliki harta dan usaha.

Fuqaha dari kalangan Halafiah dan Malikiah mengatakan orang miskin lebih parah kehidupannya dari orang fakir dengan alasan firman Allah SWT Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir (Al-Balad (90): 16)

Ayat tersebut, menurut mereka menandakan bahwa orang miskin itu mengalami penderitaan yang cukup berat sehingga bersifat dengan *Za Matrabah* yang berarti bertanah atau bergelombang dengan debu. Mereka tidak punya tempat sehingga tidur ditanah, dan boleh jadi juga tidak punya pakaian sama sekali hingga mereka ditutupi tubuhnya dengan tanah.²⁰

c. Amil Zakat

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk dalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat itu, seperti penjaga keselamatan zakat, pengelolaan zakat ternak, sekertaris, pengumpul, distributor, dan sebagainya.

d. *Muallaf Qulubuhum*

Secara etimologis, *Muallaf qulubuhum* ini berarti orang yang dijinakin hatinya. Tentu orang yang

²⁰ *Ibid* h. 203

seperti itu adalah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama Islam diberikan kepada zakat. Para ahli fiqh telah membagi *muallaf* dari golongan Islam dan non muslim. Adapun *Muallaf* dari golongan Muslim ialah:

- 1). Kelompok Muslim yang masih lemah imannya.
Dengan pemberian zakat itu diharapkan iman mereka semakin kuat terhadap Islam.
- 2). Kelompok muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah non muslim.
Dengan pemberian zakat itu, diharapkan mereka mampu sebagai penyangga masuknya non Islam yang ingin mengganggu umat Islam ke daerah Islam.

Adapun kelompok non muslim yang digolongkan kepada *muallaf qulubuhum* yang berhak menerima zakat ialah kelompok non muslim yang diijinkan hatinya dengan memberi zakat. Dengan zakat itu diharapkan terbuka hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Nabi SAW pernah memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan Ibn Umayyah, sehingga kemudian Sofyan berkata:” sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling benci kepadaku, tetapi ia selalu memberi kepadaku sehingga ia menjadi manusia yang

paling sayang kepadaku (HR. Abu Daud).²¹ Sebenarnya tidak semua ahli fiqh menyetujui pemberian zakat kepada muallaf golongan non muslim. Para ahli fiqh yang menyetujui pemberian zakat kepada golongan non muslim ialah Hanabilah dan Malakiyah, mereka membolehkannya dengan tujuan merangsang hati non muslim kepada Islam. Sementara itu, para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak setuju memberikan zakat kepada mereka setelah Nabi SAW wafat, sebab pemberian Nabi kepada mereka adalah disaat umat Islam masih sedikit dan lemah, sedangkan non-Islam (musuh) jauh lebih kuat. Dimasa Khulafa Al-Rasyidin, umat Islam telah kuat, sehingga tidak perlu lagi menjinaki hati non-muslim untuk masuk Islam.

5). *Riqab*

Dimaksud dengan *riqab* adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi zakat digunakan untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka.

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *riqab* itu adalah hamba-hamba sahaya yang telah diberikan tuanya kesempatan untuk menebus dirinya, sehingga

²¹ *Ibid* h. 204

jika tidak dibantu kemungkinan tetap saja menjadi hamba sahaya. Untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, maka dibantu dengan memberi zakat itu diharapkan ia dapat menebus dirinya. Ahli fiqh mazhab Maliki mengatakan bahwa *Riqab* dimaksud adalah membeli hamba sahaya dengan dana zakat, kemudian dimerdekakan.

6). *Gharimin*

Amir Syaripuddin mengartikan *gharimin* sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh utang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan utang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain Yusuf Qardhawi mendefinisikan sebagai orang yang berhutang yang sulit dilunasinya. Utang itu tumbuh melalui kegiatan-kegiatan sosial, bukan kemaksiatan. Para ahli fiqh klasik, seperti merumuskan definisi *gharim* itu sebagai orang yang berutang yang sulit dilunasi, baik utang itu terjadi karena kegiatan yang menyangkut dengan kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Jika ia berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, diberi bantuan zakat melunasi utangnya jika ia seseorang yang fakir, jika ia berutang untuk kepentingan orang lain (masyarakat) maka diberi bantuan zakat untuk melunasinya atas nama *gharim*,

walaupun ia seorang yang kaya.²² “ Dari Sa’id Al-khudari ra, dari Rasulullah SAW, berkata: “ Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya kecuali lima hal, yaitu orang kaya yang berperang untuk jalan allah, petugas zakat, seorang yang berutang, seorang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu ia memberi zakat kepadanya, kemudian yang miskin tadi menghadihkan zakat kepadanya, kemudian zakat itu kepadanya. “(HR Abu Daud dan Ibnu Majah). Para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *gharim* yang berhak menerima zakat itu ialah orang yang berutang, sedangkan hartanya tidak cukup satu nisab jika utangnya dilunasi dari hartanya itu. Ini berarti jika ia melunasi mencapai senisab, maka tidak berhak menerima zakat meskipun ia berutang, karena pada hakikatnya ia masih mampu melunasinya dan dengan melunasi itu tidak sampai menjadi orang miskin, *fuqaha* ialah orang yang dililit utang yang bukan karena boros dan maksiat, sedangkan ia tidak mempunyai harta pembayarannya, dan bukan pula sengaja berutang untuk mendapatkan zakat.

²² *Ibid*, h. 206

7). *Fi sabilillah*

Padanya awalnya sesuai dengan konteks sosial, *Fi sabilillah* diartikan dengan sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT. Zakat digunakan sebagai dana atau biaya angkatan perangnya pengertian ini wajar, karena penggunaan jatah *Fi sabilillah* mutlak digunakan untuk peperangan, sebab Allah SWT sering mengaitkannya dengan kata *al-qatl* dan *al-jihad* yang berarti berperang.²³ Kemudian arti *Fi sabilillah* itu diperluaskan maksudnya oleh para ahli fiqh seperti Yusuf Qardhawi. Ia mengatakan getarkan seseorang kepada kecerdasan Allah SWT. Disebut *fi sabilillah*, atau semua usaha baik yang dapat mendatangkan kemaslahatan umat manusia seperti membuat madrasah, tempat-tempat peribadatan, dan sebagainya. Jadi *sabilillah* dalam keadaan tidak perang, dapat diartikan semua usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk usaha membaggun manusia seutuhnya atau membaggun kehidupan beragama dan bernegara.

²³ *Ibid*, h. 207

8). Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan itu. Dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk ke dalam pengertian ini orang Islam yang meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang zalim. Mereka keluar meninggalkan negaranya mencari perlindungan di negara Islam lainnya. Kepada mereka diberi zakat sebagai bekal hidup di negara orang lain, termasuk juga dalam pengertian umum Ibnu Sabililah perjalanan yang membutuhkan dana untuk menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain.²⁴

7. Manfaat dan Fungsi Zakat

Manusia di samping makhluk individu, diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk sosial kehidupan selalu terkait dengan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan masyarakatnya, namun hasil materi yang diperolehnya tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari atau tidak. Sebagai makhluk sosial, manusia semuanya berasal dari keturunan yang satu, sehingga antara seorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah yang menjadikannya memiliki

²⁴ *Ibid*, h. 209

hubungan persaudaraan. Jadi kebebasan dan persaudaraan ini yang mengantarkan pada kewajiban menyisihkan sebagai kekayaan untuk orang lain dalam bentuk zakat.²⁵

a. Hikmah zakat

Para ahli telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah yang terkandung dalam persyariaan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Diantara hikmah yang dimaksud yaitu:

- 1). Mengikis sifat-sifat kekikiran dalam jiwa seorang *muzakki*, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan.
 - a). Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima (*mustahiq*)-nya, tapi juga kepada *muzakkin*-nya. Kesenjangan sosial lama kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan pemberian zakat kepada yang ekonominya lemah akan mengurangi kesenjangan itu.
 - b). Zakat bila diserahkan kepada *mustahiq*-nya secara ikhlas, disamping memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya lebih baik.

²⁵ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: Tim Permata Percetakan, 2018) h. 37

- c). Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi *muzakki*, dan dengan ketenangan usaha pengembangan hartanya, di samping terciptanya daya beli dan daya produknya.²⁶
- d). Zakat dapat menyucikan jiwa seorang mukmin yang berzakat dari sifat-sifat kikir, dan mengantarkannya kepada sifat kedermawanan.
- e). Zakat sebagai ibadah yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Yang pada giliran ia dapat melaksanakan ibadah lain dengan khusus.
- f). Zakat sebagai perwujudan dari rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya mendorongnya lebih memperkokoh tauhid, karna zakat juga merupakan aplikasi dari pengakuan terhadap kebersamaan Allah SWT.
- g). Zakat dengan pengertian kewajiban menyisihkan sebagai kekayaan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, dapat menanamkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah milikinya secara mutlak. Segala yang dimilikinya pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang harus dikembangkan kepada-Nya melalui pembayaran zakat.

²⁶ *Ibid*, h. 37-38

- h). Kebiasaan memberikan zakat dapat mengantarnya menjadi seorang mukmin yang jauh dari sifat keborosan dan ketamakkan.
- i). Dengan zakat harta seseorang lebih terjamin dari kehilangan, kesia-siaan, kemusnahan, karna dengan zakat harta yang tersisa mendapat berkah dari Allah SWT seperti yang ditegaskan Nabi dalam sabdanya: “bentengilah hartamu dengan zakat” (HR Al-Jamaah)
- j). Hikmah yang terpenting dari pemberian zakat itu ialah terlaksananya perintah Allah SWT.

b. Fungsi Sosial Zakat

Zakat sebagai amal kebaikan, di samping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukan bahwa zakat di samping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, adalah salah satu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya.

Fenomena di tengah masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat dalam ekonomi, ada golongan yang ekonominya lemah, dan ada golongan yang ekonominya kuat, dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih menjolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat terbanyak.

Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu, karna sebagian harta kekayaan yang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga golongan ekonomi seperti ini dapat diperbaiki. Dengan zakat hubungan pergaulan antara ke dua golongan yang berbeda tadi semakin harmonis.²⁷

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-'ibadah fi al-Islam*. Mengatakan bahwa zakat itu adalah milik masyarat, karna mendapatkannya juga adalah atas usaha masyarakat. Orang kaya tidak akan menjadi kaya kalau orang yang miskin tidak ada. Kekayaan yang diperoleh seseorang tidak terlepas dari peran orang lain oleh karna itu wajar jika Allah SWT memerintahkan memungut zakat dari harta orang yang kaya dan diberikan kepada yang lain yang sedang membutuhkan.

Zakat apabila dilaksanakan secara teratur, merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat. Bahwa harta benda bukanlah merupakan tujuan hidup dan bukan hak mutlak dari manusia yang memilikinya, melainkan milik Allah yang dititipka-Nya yang harus digunakan sebagai alat untuk memperoleh tujuan hidupnya, Syauqi Ismail Syahatin dalam bukunya *Al-zakat* menulis bahwa zakat berfungsi sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, memberantaskan kemiskinan dan kemelaratan umat manusia. Dalam hal zakat merupakan bukti kepedulian sosial serta kesetiaan kawan nasional.

²⁷ *Ibid*, h.39

Diantara fungsi sosial zakat ialah penjinak hati dan penyebar Islam itulah sebabnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya masih lemah terhadap Islam di samping memperjinak hati mereka. Dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, menulis bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tolong menolong sesama manusia, orang-orang yang telah beruntung memperoleh rezeki yang banyak memberikan sebagian yang diterimanya itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan.²⁸

B. Gaji

1. Definisi Gaji

Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugasnya administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara periodik/bulanan. Gaji merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan kepada karyawannya. masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak.²⁹ menyangkut penentuan upah kerja Syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik

²⁸ *Ibid*, h.41

²⁹ Suhrawardi k. Lubis, Farid Wajar, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014)

dalam ketentuan Al-Quran maupun sunnah Rosul. Secara umum, ketentuan Al-Quran yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukann kebaikan , dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat di kemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata ”kerabat” dalam ayat itu dapat diartikan”tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Upah dalam hukum Islam atau dalam Bahasa Arab, upah disebut *Ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk mandasar dari kata *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.³⁰ dari segi bahasa *al-ajru* berarti *'iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.³¹ Permasalahan pengupahan, dalam Islam

³⁰ Ahma Warson Munawir, *Al-munawir Kamus Arab-Indonesia Edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9

³¹ Afzalurahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 395

menempatkan sesuatu pembahasan dalam kitab fiqh terdapat dalam bab *Ijarah*, secara bahasa *Ijarah* dan *ujrah* mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan.³²

Pengertian upah yaitu Hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan, atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarga. Peraturan pemerintah yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawannya untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan termaksud tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.³³ Upah juga menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti jasa menurut istilah (terminologi), upah juga mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³⁴

³²Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 34

³³Radar Jaya Offset, *Praturan Upah Mini mum Di 27 Provinsi Indonesia edisi 1993* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1993), h. 296

³⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Iain Raden Intan Lampung, 2015),h. 187

2. Jenis –jenis Gaji

Jenis- jenis gaji yang terkait yaitu:

- a. Upah harian, merupakan pembayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
- b. Upah bersih, merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
- c. Upah lembur, merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan buruh yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- d. Upah borongan, yaitu merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawannya bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
- e. Upah wajar, yaitu merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.
- f. Upah minimum, yaitu merupakan upah yang paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya.³⁵

3. Sistem pembayaran Gaji

Beberapa cara sistem pembayaran Upah/Gaji

- a. Cara memberi upah menurut waktu, yaitu menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
h. 229

masing-masing tenaga kerja, tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka, keuntungan sistem Upah menurut waktu yaitu:

- 1). Para pekerja tidak perlu terburu-buru di dalam menjalankan pekerjaan, karena itu banyak sedikitnya unit yang mampu mereka selesaikan tidak terpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima. Dengan demikian kualitas barang atau jasa yang diberikan akan terjaga.
- 2). Bagi para tenaga kerja yang banyak, mereka akan memperoleh upah yang sama dengan yang diterima oleh tenaga kerja lainnya.

Kerugian cara upah menurut waktu yaitu

- a). Para tenaga yang terampil akan mengalami kekecewaan karna mereka tidak mendapatkan upah yang lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak terampil, sehingga tenaga yang terampil mengalami kurang bersemangat dalam bekerja.
 - b). Adanya kecenderungan para pekerja untuk bekerja lambat karena besar kecilnya unit yang dihasilkan tidak berpengaruh pada besar kecilnya upah yang mereka terima.
- b. Cara upah menurut unit hasil, yaitu yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja, semakin banyak upah yang diterima. Keuntungan cara upah menurut unit usaha yaitu:
- 1). Para tenaga kerja yang terampil akan mempunyai semangat kerja yang tinggi, dan akan menunjukkan

kelebihan keterampilannya, karena besar kecilnya upah yang akan mereka terima. Akibatnya produktivitas perusahaan meningkat.³⁶

- 2). Adanya kecendrungan pekerja untuk berkerja lebih semangat, agar memperoleh upah yang lebih besar. Kerugian cara upah menurut unit hasil yaitu:
 - a) Para pekerja akan bekerja terburu-buru, sehingga kualitas barang atau jasa kurang terjaga.
 - b) Para pekerja yang kurang terampil akan selalu memperoleh upah yang rendah, akibatnya mereka kurang mempunyai semangat kerja.
 - c). Cara upah dengan insentif, yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja.³⁷ Cara menentukan upah kerja, setidaknya dapat dipedomani sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (dalam Ahmad Azhar Basyir, 1993: 194), *“Bahwa ajir khas pembantu rumah tangga, yang berada dibawah kekuasaan kepala rumah tangga hendaklah diberi makan seperti yang dimakan oleh keluarga rumah tangga, diberi pakaian seperti yang dipakai keluarga rumah*

³⁶Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*, <https://sistem.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-tenaga-kerja-langsung/sistem-upah-dan-tenaga-kerja-langsung/>. (Akses 12 agustus 2020).

³⁷ *Ibid*

tangga, jangan diberi peerjaan diluar kekuatan wajar. Jika dibebani pekerjaan hendaklah dibantu untuk meringankan.”

Ketentuan hadis tersebut tidak dikemukakan mengenai tempat tinggalnya. Hal itu tentunya dimaklumi, sebab pembantu rumah tangga selalu bertempat tinggal dirumah keluarga tempat berkerjanya. Kalau ketentuan hadis tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja pada umumnya, bahwa tingkat upah yang harus diberikan si majikan kepada si pekerja, haruslah dapat memeuhi:

- (1). Kebutuhan pangan si pekerja
- (2). Kebutuhan sandang
- (3). Kebutuhan tempat tinggalnya.³⁸

4. Fungsi dan Tujuan Penggajian

- a. Fungsi penggajian menurut Komaruddin yaitu fungsi gaji bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan gaji yang adil dan layak saja, tetapi masih ada fungsi-fungsi yang lainnya yaitu: menurut komaruddin fungsi penggajian untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi, untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang

³⁸ Suharwardi k. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), h.168

tinggi, lalu untuk memelihara prestasi pekerja selama priode yang panjang.

b. Tujuan penggajian menurut Hasibuan tujuan penggajian antara lain:

1). Ikatan kerja sama

Caranya Dengan pemberian gaji terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tusa-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2). Kepuasan kerja

Caranya Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

3). Pengadaan efektif

Jika program gaji ditetapkan cukup besar, menejer akan mudah memotivasi bawahannya.

4). Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, menejer akan mudah memotivasi bawahannya.

5). Stabilitas karyawan

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena ternover relatif kecil.

6). Disiplin

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik, maka karyawan akan menyadari serta mentaati praturan-praturan yang berlaku.

7). Pengaruh serikat buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

8). Pengaruh pemerintah

Jika program gaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku (seperti batas gaji minimum) maka intervensi pemerintahan dapat dihindarkan.³⁹

5. Prosedur Penggajian

Prosedur penggajian ada beberapa cara memberi upah , yaitu:

- a. Prosedur penetapan gaji yaitu penentuan dan pencatatan waktu kerja sebagai dasar untuk menghitung gaji, mengadakan pemeriksaan atas perhitungan pencatatan dan pembuatan daftar gaji, melakukan pembayaran serta penyimpanan gaji yang di ambil oleh yang berhak.
- b. Pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan itu hendaknya oleh orang yang cakap, meliputi pengetahuan dan adanya wewenang yang cakap.
- c. Pemisahan fungsi pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan, dilakukan oleh orang yang cakap saja jika

³⁹ *Gaji; Definisi, Peran, Fungsi dan Tujuan Penggajian* (On-line) tersedia di: <http://jurnal-sdm.blogspot.com>, di akses 25 agustus 2020.

cukup, sebab pengendalian tidak akan berfungsi apabila suatu prosedur dikerjakan oleh suatu orang dari awal sampai akhir.⁴⁰

Dasar hukum penentuan upah di tentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan atas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firmannya pada surat Al-Ahqaf ayat 19, “ *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan. mereka tiada dirugikan.*”

Upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulkannya. Tanggungannya nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan dan hidup dengan layak.

Terdapat syarat dan rukun *Ujrah* dalam sistem penggajian atau upah mengupah yaitu: menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Ujrah* yaitu Ijab dan Qabul, yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa dan meyewa. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun ijarah itu ada empat ,yaitu:

⁴⁰Prosedur Penggajian (On-line) Tersedia di: <http://elib.unikom.ac.id>, diakses (24 agustus 2020).

- 1) *Mu'ajir* dan *musta'jir*
- 2) *Shighat*
- 3) *Ujrah* (upah) Yaitu: sesuatu yang diberikan kepada *Musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Dengan syarat hendaknya:
 - a). Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.⁴¹
 - b). pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
 - c). Uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang disewakan.⁴²
6. Penggajian di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2018/ pp 14/2014

Sistem penggajian upah dalam Islam, pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan. Adapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Seolah-seolah pengupahan merupakan pekerjaan yang selalu membantu pihak manajemen berpikir berulang-ulang untuk menetapkan kebijakan tersebut.

⁴¹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27-28.

⁴² M. Ali Hasan, *Barbagai Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

Tidak sedikit besarnya upah juga selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan pihak yang dipekerjakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa di negara kita tentang kelayakan upah yang tidak sesuai dengan harapan, tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam Islam secara konsep yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga prinsip, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebijakan.⁴³

Penjelasan secara umum UU pengelola Zakat, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan prantaraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu di ganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan

⁴³ Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 67

perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.⁴⁴

Pelaksanaan tugas, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Isi UU Pengelolaan Zakat di bawah ini adalah isi UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (bukan format asli).

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan di lakukan.

Penetapan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (pasal 90 ayat 1 UU No. 13/2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003).⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Penjelasan Tentang Kerja dan Upah <https://gajimu.com>, diakses pada tanggal 27 agustus 2020

Hak keuangan pimpinan dan Remunerasi Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota selain pimpinan sebagai berikut:

- a. Hak keuangan Pimpinan, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota bersumber dari APBD. Hak keuangan pimpinan juga dapat berasal dari APBN melalui kementerian Agama RI. Dalam hal dana APBD/APBN belum ada atau jumlahnya tidak memadai, maka hak keuangan pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat bersumber dari hak amil.

Sedangkan Hak amil tidak mencukupi, hak keuangan dapat di ambil dari lokasi dana infak atau *fi sabillillah* BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota atas persetujuan BAZNAS. Lalu hak keuangan pimpinan terdiri dari gaji atau honor, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, BPJS kesehatan dan tunjangan lainnya di sesuaikan dengan kondisi keuangan lembaga.

Besar gaji atau honor pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dapat diusulkan ke pemimpinan daerah paling sedikit sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Surat edaran ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 tahun 2018, *Tentang Pedoman Zakat Nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota*, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> , diakses pada tanggal 27 agustus 2020, h.16

Tabel: 1.1
 Besar gaji atau honor Pimpinan Baznas

No	Jabatan	Rage gaji/bulan
1	Ketua BAZNAS Provinsi	3 - 6 x UMP
2	Waki ketua BAZNAS Provinsi	3 - 5 x UMP
3	Ketua BAZNAS Kabupaten/kota	3 - 5 x UMP
4	Wakil ketua BAZNAS Kabupaten Kota	2,5 - 4 x UMP

Sumber dari: Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional

- b. Remunerasi Amil di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota selain pimpinan adalah sebagai berikut: Lembaga memberikan hak amil kepada amil zakat sesuai matriks pangkat jabatan dan golongan, dan hak amil yang diberikan minimal sebesar upah Minimum Regional (UMR) setiap daerah. Dan Lembaga melakukan pemotongan hak amil secara langsung atas kewajiban-kewajiban amil zakat yang meliputi : zakat, pajak PPH pasal 21, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, pengembalian uang muka dan pemotongan hak amil karena sanksi keterlambatan atau sangsi-sangsi keterlambatan atau sangsi-sangsi lainnya. Lalu komponen hak amil terdiri dari hak amil pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap (kehadiran, lembur dan lain-lain).⁴⁷

⁴⁷ *Ibid* h. 17

Penilaian kinerja selain pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:

- a). Untuk membantu Amil Zakat dalam meningkatkan prestasi kerja, atasan langsung secara berkala menilai prestasi kerja amil zakat yang ada dibawahnya menurut ketentuan lembaga.
- b). Hasil penelitian prestasi kerja dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kenaikan gaji dan promosi, mutasi dan demosi jabatan Amil Zakat yang bersangkutan serta pemberian bonus (jika ada).
- c. Waktu kerja Amil Zakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Waktu kerja ini hanya berlaku untuk Amil Zakat selain Pimpinan. Untuk Pimpinan dapat menentukan waktu kerja tersendiri sesuai keputusan Rapat Pleno Pimpinan sepanjang tidak mengganggu operasional keseluruhan lembaga.
 - 2). Penentuan mengenai hari kerja dan jam kerja seorang amil zakat akan diatur oleh lembaga.⁴⁸
 - 3). Setiap Amil zakat yang terlambat masuk kerja akan diberikan sanksi berupa pemotongan dari Tunjangan kehadiran dalam setiap bulannya, adapun perhitungannya akan diatur terpisah dalam Surat Keputusan Pimpinan Lembaga.

⁴⁸ *Ibid* h.18

- 4). Apabila Amil Zakat tidak hadir kerja pada hari kerja karena sakit maka secepatnya yang bersangkutan/keluarga wajib memberitahu kepada atasan langsung dan manajemen secara lisan atau secara tertulis.
- 5). Amil Zakat yang tidak hadir kerja pada hari kerja lebih dari 1 (satu) hari karena sakit diharuskan membawa surat keterangan Dokter.
- 6). Amil Zakat yang tidak hadir kerja pada hari kerja tanpa ijin, dianggap tidak hadir tanpa ijin/mangkir dan dapat diberi surat teguran. Jumlah hari ketidakhadiran karena mangkir akan mengurangi jatah cuti.
- 7). Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Amil Zakat yang melebihi waktu kerja biasa pada hari kerja, atau karena melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal atas perintah atasan yang berwenang yang dilakukan untuk kepentingan lembaga.⁴⁹
- 8). Perhitungan upah lembur diatur tersendiri. Perhitungan upah lembur mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. Kep. 102/MEN/V1/2004.
- 9). Izin meninggalkan waktu kerja dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid* h. 19

Tabel 1.2
Waktu Izin meninggalkan waktu kerja.

No	Kondisi	Jumlah
1	Kematian suami/ istri, orang tua/ mertua atau anak/ menantu	3 (tiga) hari kerja
2	Kematian anggota keluarga dalam satu rumah	2 (dua) hari kerja
3	Pernikahan Amil	3 (tiga) hari kerja
4	Pernikahan anak	2 (dua) hari kerja
5	Khitanan anak/ Aqiqah anak	1 (satu) hari kerja
6	Istri melahirkan atau keguguran kandungan.	2 (dua) hari kerja

Sumber dari: Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional

d. Cuti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Amil zakat berhak mendapatkan cuti tahunan, apabila telah diangkat menjadi amil tetap atau amil kontrak dengan masa kerja minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- 2). Hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja untuk periode januari sampai desember, dengan mendapatkan upah penuh, selain tunjangan kehadiran, dari lembaga.

- a). Amil zakat berhak mendapatkan cuti panjang, apabila telah menjadi amil tetap dengan masa kerja 5 (lima) tahun, dengan lama cuti 18 (delapan belas) hari termasuk 12 (dua belas) hari cuti tahunan.
- b). Bagi amil zakat yang bermaksud menunaikan Ibadah Haji, diberikan waktu paling lama sesuai dengan pelaksanaan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Departemen Agama RI, dengan mendapatkan upah penuh, selain tunjangan kehadiran.
- c). Bagi Amil zakat yang bermaksud menunaikan Ibadah Umroh, diberikan waktu paling lama 10 hari kerja dan hanya diberikan pada amil tetap.⁵⁰

Di dalam Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam penentuan upah, Rasulullah SAW, memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberi dorongan semangat pekerja untuk memulai pekerjaan, dan

⁵⁰ *Ibid* h. 20

memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikannya.⁵¹

C. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Novita Permata Sari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, judul skripsinya yaitu Hukum Islam Tentang Sistem Upah Karyawan Ayam Geprek, kesimpulannya yaitu:⁵²

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab-bab nya maka dapat disimpulkan sistem pengupahan rumah makan ayam geprek Hani Sukarame, Bandar Lampung ada perbedaan gaji karyawan dan sesuai diawali akad perjanjian kerja. Di dalam perjanjian dikatakan adanya upah tambahan buat karyawan yang berkerja lembur, akan tetapi pada waktu menerima gaji atau upah pemilik tidak memberikan upah tambahan bagi karyawan yang lembur berkerja. Dalam pandangan hukum Islam upah yang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad atau perjanjian awal, termaksud tidak diberikan upah tambahan lembur yang dijanjikan, maka akad atau perjanjian kerja tersebut dibatalkan akad yang rusak. Sesuai pada pembahasan tentang hadis upah.⁵³ perbedaan dari sekripsi ini adalah bahwa gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan perjanjian awal dan pemilik tidak memberikan tambahan upah lembur berkerja. sedangkan di

⁵¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012). h. 202

⁵² Novita Permata Sari, *Hukum Islam Tentang Sistem Upah Karyawan Ayam Geprek*, Skripsi, Fakultas Syariah , Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

⁵³ *Ibid*

skripsi saya bahwa gaji yang Baznas dapatkan sudah sesuai dengan perjajian awal mereka berkerja.

2. Skripsi yang ditulis oleh Afrizal, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Judul skripsi nya yaitu: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisis data-data yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan maslah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik didesa Sukajaya kecamatan Katibung kabupaten Lampung Selatan, telah memenuhi kesempatan pada saat pertama kalinya saja dan telah menjadi kebiasaan dimana sistem pengupahannya setiap 10 kg beras dari hasil penggilingan dibayar dengan 1kg beras.
- b. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan pada dengan beras di desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah mengupah, serta berdasarkan kesempatan kedua belah pihak.

Jadi dalam melakukan pemotongan upah jika menggunakan beras berlangsung diharuskannya kedua belah pihak harus menghadiri secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua

belah pihak, antara pihak pabrik dan petani harus mentoleransi dalam hasil yang berbeda, untuk menjaga hubungan baik antara keduanya.⁵⁴ Perbedaan skripsi ini adalah bahwa pemilik pabrik mengambil upah setiap 10kg di ambil 1kg buat bayar upahnya, sedangkan di skripsi saya gaji yang di dapatkan sebagian dari Amil zakat yaitu 12,5%.

3. Skripsi ini ditulis oleh Oktalia Dinata, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, judul skripsi nya yaitu: Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam Uang. Praktik usaha pinjam uang di pekon Rawas Kec. Pesisir tengah, Kab pesisir Barat telah dijalankan cukup lama dan mulai menjadi kebiasaan masyarakat Pekon Rawas hingga saat ini. Usaha ini dijalankan dengan menerapkan sistem bunga yang bervariasi mulai dari Rp. 30.000/hari, Rp.200.000/minggu dan 10% dari jumlah pinjaman, dan dikenakan denda Rp. 10.000/hari apabila telat dalam membayar.

Dari hasil usaha pinjam meminjam uang tersebut para pemilik usaha mengeluarkan zakat hartanya dalam waktu satu tahun yang bertujuan untuk ibadah/membersihkan hartanya, zakat harta tersebut setelah mencapai *nisab* dan *haul-nya*, maka para pemilik usaha sekaligus para pembayar zakat menyerahkan langsung kepada orang yang berhak disekitaran tempat tinggalnya tanpa melalui *amil* zakat yang secara hukum Islam dalam pembayaran zakat sangat dianjurkan melalui *amil* zakat.

⁵⁴ Afrizal, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Menurut hukum Islam, zakat harta haram atau harta yang diperoleh dengan cara yang dilarang dalam Islam hukumnya adalah haram (tidak sah), karena harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Sebab zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat halal, baik zakatnya maupun cara memperolehnya. Yang dimaksud dengan harta haram karena menurut hukum Islam usaha pinjam meminjam uang yang dijalankan dengan sistem bunga tersebut sama halnya dengan *Riba* (tambahan).

Jadi dalam usaha pinjam meminjam uang seharusnya tidak menerapkan bunga kepada peminjam, karna dapat merugikan kepa peminjam dan dapat menambah beban peminjam dalam membayar hutangnya.⁵⁵perbedaan dari skripsi ini yaitu zakat yang di ambil dari usaha pinjam meminjam dari sistem bunga, sedangkan skripsi saya mengambil zakat yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam.

Dan perbedaan menyeluruh yaitu penelitian yang diatas dengan penelitian yang saya buat adalah yang pertama tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Karyawan Ayam Geprek, kedua Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggupahan Penggilingan Padi Dengan Beras, ketiga Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam, Uang menurut para ulama Indonesia, sedangkan saya membahas Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penggajian Pengelola Zakat.

⁵⁵ Oktalia Dinata, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam Uang*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden intan Lampung, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Dzulkarnain Sunusi, *Fiqh Zakat Kontemporer*, Yogyakarta: Diva Press, 2013
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Zakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Gamsir Bahmid, *Prilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Citra Persada, 2002.
- Nurrudin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung; Pusat Penelitian Dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Moh Pabundutika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Moh, Nazir, *Metode Penelitian* , Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

- Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Abror Khoirul , *Fiqih Ibadah*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2004.
- Abror Khoirul, *Fiqih Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung: Tim Permata Percetakan, 2018
- Suhrawardi k. Lubis, Farid Wajar, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014
- Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir kamus Arab-Indonesia Edisi II*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Afzalurahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hida karya Agung, 1989
- Radar Jaya Offset, *Praturan Upah Mini mum Di 27 Provinsi Indonesia edisi 1993* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1993.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Iain Raden Intan Lampung, 2015,
- Sahroni Oni, M. Hasanuddin, *fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016,
- M. Ali Hasan, *Barbagai Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Suharwardi k. Lubis, farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, (2014).

Afzalur Rahman dkk, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2014,

Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Pustaka, 1985,

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.

Jurnal/ Skripsi

Novita Permata Sari, *Hukum Islam Tentang Sistem Upah Karyawan Ayam Geprek*, Skripsi, Fakultas Syariah , Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Afrizal, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Oktalia Dinata, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Dari Hasil Usaha Pinjam Meminjam Uang*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden intan Lampung, 2019).

Wawancara

Wawancara Dengan Nurma Yulia Sebagai Bagian Keuangan dan Pelaporan dan Karyawan di Baznas.

Wawancara Dengan Doni Peryanto, Spi, Sebagai Bagian Kepala Kelaksana, Berkerja di Baznas Bandar Lampung.

Wawancara Dengan Rizki Fitriansyah, SE. Sebagai Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Berkerja di Baznas.

Al-Quran/Undang-Undang

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan, Q,S Al-Baqarah 2:43.

Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 3 Tahun 2018, *Penyeban Luasan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No 24 Tahun 2018*.

Direktorat Pemberdayaan Zakat direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Zakat ketentuan Dan Permasalahannya*, tahun 2008.

Sumber on-line

Gaji, Definisi, Peran, Fungsi, dan Tujuan Penggajian (on line) Tersedia di: <http://jurnal-sdm.blogspot.com> , di akses 25 agustus 2020.

Prosedur Penggajian (on line) Tersedia di: <http://elib.unikom.ac.id>, diakses 24 agustus 2020.

Hendra Poerwanto, *Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah*, <https://sistem.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-tenaga-kerja-langsung/sistem-upah-dan-tenaga-kerja-langsung/>. (Akses 12 agustus 2020)

Penjelasan Kerja dan Upah Tersedia di: <https://gajimu.com>, diakses 27 agustus 2020.

Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 tahun 2018, *Tentang Pedoman Zakat Nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota*, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses 27 agustus 2020,

Zakat (On line) Tersedia Di: <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Tanggal 27 agustus 2020